

ANALISIS PERTUMBUHAN SERTA KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

Azwina Putri Anggari¹, Susy Hambani², Maria Magdalena Melani³

Universitas Djuanda

e-mail: azwina.putri2020@unida.ac.id¹, susy.hambani@unida.ac.id²,
maria.magdalena@unida.ac.id³

Abstrak – Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya cukup potensial untuk peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, serta mengelompokkannya kategori/ komponen kedalam kuadran I-IV di Kabupaten Bogor berdasarkan Tipologi Klassen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Tipologi Klassen. Hasil analisis menunjukkan Pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD menunjukkan laju pertumbuhan yang fluktuatif setiap tahunnya. Kontribusi pajak daerah yang paling berkontribusi adalah pajak BPHTB dengan rata-rata presentase sebesar 28,03%. dan kontribusi retribusi daerah yang paling tertinggi terdapat pada komponen retribusi izin mendirikan bangunan dengan presentase rata-rata sebesar 2,29%. Selanjutnya berdasarkan Tipologi Klassen terdapat 11 komponen pajak daerah dan 10 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran I (Prima), 4 komponen pajak daerah dan 5 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran II (Potensial), 1 komponen pajak daerah dan 2 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran III (Berkembang), serta 1 komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran IV (Terbelakang).

Kata Kunci: kontribusi, Pertumbuhan, Tipologi Klassen, Pajak & Retribusi, PAD.

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah sebagai bentuk peran masyarakat secara nyata dalam menyelenggarakan otonomi daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Kabupaten Bogor adalah sebuah wilayah yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kebijakan mengenai pendapatan asli daerah telah diatur dalam perundang-undangan yang menuntut pemerintahan Kabupaten Bogor untuk mendatangkan pemasukan guna pemenuhan pencapaian target pendapatan asli daerah dan seluruh sektor yang ada di daerah Kabupaten Bogor. Adapun target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	2.475.535.726.000	2.794.660.740.152	112,89%,
2	2019	2.676.364.947.000	3.161.165.915.498	118,11%

3	2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282	114,11%
4	2021	3.291.322.687.957	3.761.911.243.274	114,30%
5	2022	3.739.093.754.030	3.736.339.670.708	99,93%

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor, 2024.

Seperti yang terlihat pada tabel di atas bahwa PAD di Kabupaten Bogor dari tahun 2018-2021 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya dikarenakan upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Namun, pada tahun 2022 persentase realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan sekitar 14,37% dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Persentase yang dicapai hanya sebesar 99,93% realisasi yang tercapai pada tahun 2022. Sedangkan realisasi dengan presentase terbesar berada pada tahun 2019 yaitu 118,11%.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah seharusnya cukup potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah terbanyak dalam suatu daerah. Apalagi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Bogor beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat dilihat realisasinya di tahun 2018 hingga tahun 2022 seperti di tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	1.687.912.794.000	1.969.519.761.542	116,68%
2	2019	1.845.902.796.000	2.243.429.745.163	121,54%
3	2020	1.576.416.115.000	1.857.411.776.716	117,82%
4	2021	2.090.578.509.000	2.455.982.013.967	117,48%
5	2022	2.369.772.820.000	2.595.242.368.968	109,51%

Sumber: Bappenda Kabupaten Bogor, 2024

Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2018	149.593.578.000	112.776.035.992	75,39
2	2019	159.919.751.000	141.468.140.179	88,46
3	2020	130.262.331.844	128.914.969.533	98,97
4	2021	137.901.142.404	126.416.502.513	91,67
5	2022	153.751.721.189	93.889.999.876	61,07

Sumber : Bappenda Kabupaten Bogor, 2024

Dari tabel target dan realisasi retribusi daerah di atas dapat dilihat untuk realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi retribusi daerah tertinggi terdapat pada tahun 2020 yaitu sebesar 98,97%. Sedangkan untuk realisasi terendah berada pada tahun 2022 dengan presentase yang tercapai sebesar 61,07%.

Berdasarkan penelitian dari Maxwell (2013) menunjukkan bahwa rata-rata persentase efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 97.11% dengan kriteria efektif dan 85.55% dengan kriteria sangat baik berkontribusi, rata-rata efektivitas dan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Bali periode 2016-2020 sebesar 84.84% dengan kriteria cukup efektif dan 1.20% dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Hasil penelitian dari Riftiasari (2018) menunjukkan bahwa pajak daerah di DKI Jakarta memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 84,74% dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan presentase kontribusi rata-rata sebesar 2,86%. Penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dan belum menunjukkan konsistensi yang sama terhadap

pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah. Maka peneliti kembali mengkaji pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan metode penelitian Tipologi Klassen. Dengan judul “Analisis Pertumbuhan Serta Kontribusi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.”

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD yang diperoleh dari analisis data. Penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) yang beralamat Jln. Tegar Beriman No.1, Kabupaten Bogor, Cibinong, Kelurahan Pakansari, Jawa Barat.

Desain Penelitian menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka (Library Research), observasi, dokumentasi, dan Jenis data digunakan yaitu data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam mengolah data yang bersifat deskriptif penulis menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis dilakukan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data kemudian menginterpretasikan hasilnya. Variabel yang dikumpulkan, dikelompokkan dan dihitung untuk menentukan hasil penelitian yang akan dicapai. Selama prosesnya, pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah, berikut ini adalah table rekapitulasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor periode 2018-2022

PAD di Kabupaten Bogor dari tahun 2018-2021 selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya dikarenakan upaya pemerintah dalam menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah. Namun, pada tahun 2022 persentase realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan sekitar 14,37% dari tahun sebelumnya dan tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Persentase yang dicapai hanya sebesar 99,93% realisasi yang tercapai pada tahun 2022. Sedangkan realisasi dengan presentase terbesar berada pada tahun 2019 yaitu 118,11%.

Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Laju pertumbuhan pajak daerah dapat dikatakan sangat berhasil jika hasil perhitungan laju pertumbuhan tersebut mencapai angka 85% untuk mendapatkan hasil tersebut maka nilai penerimaan pajak daerah pada tahun tertentu harus lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu minimal 2 kali lipat agar laju pertumbuhan pada tahun tertentu dikatakan berhasil.

Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Pajak Daerah	Tahun			
	2018 - 2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
Pajak Hotel	24,30%	-37,69%	31,22%	51,16%
Pajak Restoran	21,99%	-28,01%	37,87%	54,89%
Pajak Hiburam	-4,41%	56,81%	-13,00%	127,61%
Pajak Tontonan Film	9,69%	-68,85%	-31,92%	294,66%
Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	-58,69%	-100,00%	-	-94,40%
Pajak Pameran	-3,50%	-50,96%	-100,00%	-
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-93,09%	-66,11%	-120,46%	-21,29%
Pajak Permainan Biliard dan Bowling	-32,13%	-75,74%	-100,00%	-
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	-	-64,83%	-18,46%	215,79%
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran	7,35%	-63,49%	-26,07%	166,86%
Pajak Pertandingan Olahraga	40,06%	-88,58%	84,54%	372,04%
Pajak Reklame	6,36%	-16,60%	12,05%	20,49%
Pajak PPJ PLN	5,49%	-3,66%	6,38%	14,63%
Pajak Parkir	2,92%	-40,10%	34,41%	63,49%
Pajak Air Tanah	5,37%	-5,82%	16,81%	5,01%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-2,86%	-11,71%	2,25%	1,04%
Pajak PBB P2	12,26%	-8,07%	13,21%	0,20%
Pajak BPHTB	22,54%	-21,53%	153,79%	-39,35%

Sumber : Data diolah, 2024

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Kontribusi pajak daerah dapat dikatakan sangat baik jika kontribusi tersebut melebihi angka 50% untuk mendapatkan hasil tersebut maka realisasi penerimaan pajak daerah harus mencapai setengah dari realisasi penerimaan PAD bahkan lebih.

Tabel 6. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Pajak Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pajak Hotel	2,92%	3,21%	2,25%	2,20%	3,35%
Pajak Restoran	5,07%	5,47%	4,43%	4,56%	7,11%
Pajak Hiburam	2,74%	2,32%	1,13%	0,73%	1,68%
Pajak Tontonan Film	0,28%	0,27%	0,09%	0,05%	0,19%

Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	0,13%	0,05%	-	0,57%	0,03%
Pajak Pameran	1,82%	1,56%	0,86%	-	1,13%
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,43%	0,03%	0,01%	0	0,01%
Pajak Permainan Biliard dan Bowling	0	0	0,00	0,00	0,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	-	0,34%	0,13%	0,08%	0,26%
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran	0,07%	0,07%	0,03%	0,01%	0,04%
Pajak Pertandingan Olahraga	0,01%	0,01%	0	0,00	0,01%
Pajak Reklame	0,71%	0,67%	0,63%	0,53%	0,64%
Pajak PPJ PLN	9,59%	8,95%	9,69%	7,70%	8,98%
Pajak Parkir	0,38%	0,35%	0,24%	0,24%	0,39%
Pajak Air Tanah	2,26%	2,11%	2,23%	1,95%	2,06%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5,04%	4,33%	4,30%	3,28%	3,34%
Pajak PBB P2	18,24%	18,10%	18,72%	15,83%	15,97%
Pajak BPHTB	23,52%	25,48%	22,49%	42,64%	26,03%

Sumber: Data diolah, 2024

Pertumbuhan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Tabel 7. Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Retribusi Daerah	Tahun			
	2018-2019	2019 - 2020	2020 - 2021	2021 - 2022
Retribusi Jasa Umum	-6,27%	-16,98%	4,76%	18,62%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-30,48%	-60,10%	-14,78%	22,82%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9,49%	16,11%	6,50%	22,81%
Retribusi Pemakaman dan pengabuan	7,88%	12,06%	55,55%	-4,93%
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	-21,72%	-48,53%	3,27%	11,67%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	22,22%	19,48%	13,39%	9,73%
Retribusi Penyediaan dan/ Pelayanan Penyedotan Kakus	11,51%	-0,80%	32,35%	22,39%
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	-	-5,55%	24,26%	-5,18%
Retribusi Menara dan Telekomunikasi	36,23%	3,07%	8,92%	7,48%
Retribusi Jasa Umum	9,61%	-15,70%	24,81%	44,39%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	161,49%	-35,93%	7,18%	23,66%
Retribusi Penyewaan Tanah/ Rumija-PPR	-10,59%	7,91%	11,40%	19,87%
Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-43,78%	275,64%	-2,18%
Retribusi Kendaraan Berat	-	-	-	13,09%
Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Penumpang	5,87%	-48,74%	-13,25%	11,61%
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,30%	-5,85%	53,84%	-11,41%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-87,05%	88,01%	142,53%	263,66%
Retribusi Perizinan Tertentu	43,22%	-4,80%	-7,00%	-47,24%
Retribusi Mendirikan Bangunan	47,32%	-6,10%	-5,73%	-44,92%
Retribusi Izin Trayek	-37,92%	-40,62%	8,59%	0,70%
Retribusi Izin Memeperkerjakan Tenaga Kerja Asing	-8,75%	25,82%	-28,59%	-100,00%

Sumber : Data diolah, 2024

Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Hasil perhitungan kontribusi Retribusi daerah ada pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor

Retribusi Daerah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Retribusi Jasa Umum	1,41%	1,17%	1,09%	0,86%	1,02%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,76%	0,47%	0,21%	0,13%	0,17%
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,51%	0,50%	0,65%	0,52%	0,64%
Retribusi Pemakaman dan pengabuan	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,06%	0,07%	0,09%	0,08%	0,08%
Retribusi Penyediaan dan/ Pelayanan Penyedotan Kakus	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	0,00%	0,06%	0,07%	0,06%	0,06%
Retribusi Menara dan Telekomunikasi	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
Retribusi Jasa Umum	0,30%	0,29%	0,28%	0,26%	0,38%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,06%	0,13%	0,09%	0,08%	0,09%
Retribusi Penyewaan Tanah/ Rumija-PPR	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%	0,14%
Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Retribusi Kendaraan Berat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Penumpang	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,07%	0,01%	0,02%	0,03%	0,11%
Retribusi Perizinan Tertentu	2,38%	3,02%	3,23%	2,24%	1,19%
Retribusi Mendirikan Bangunan	2,21%	2,88%	3,04%	2,14%	1,19%
Retribusi Izin Trayek	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Retribusi Izin Memeperkerjakan Tenaga Kerja Asing	0,16%	0,13%	0,18%	0,10%	0,00%

Sumber : Data diolah, 2024

Klasifikasi Tipologi Klassen (Kuadran I-IV) terhadap Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata kontribusi dan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Tipologi Klassen terdapat 4 klasifikasi kuadran yaitu kuadran I (prima), kuadran II (potensial), kuadran III (berkembang), dan kuadran IV (terbelakang). Terdapat 11 komponen daerah dan 9 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran I, 3 komponen pajak daerah dan 5 komponen retribusi daerah masuk kedalam kuadran II, 1 komponen pajak daerah dan 2 komponen retribusi daerah masuk kedalam kuadran III, dan terdapat 1 komponen pajak daerah dan 1 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran IV. Berikut tabel klasifikasi Tipologi Klassen terhadap pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bogor:

Tabel 9. Klasifikasi Tipologi Klassen terhadap Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Bogor

Rasio Proporsi (Kontribusi)		
Rasio Pertumbuhan	Kuadran I Prima	Kuadran III Berkembang
	Pajak Daerah 1. Pajak Air Tanah 2. BPHTB 3. Pajak Reklame 4. Pajak PPJ PLN 5. Pajak Parkir 6. Pajak Tontonan Film 7. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 8. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa 9. Pajak Hotel 10. Pajak PBB P2 11. Pajak Restoran	Pajak Daerah 1. Pajak Pertandingan Olahraga Retribusi Daerah 1. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan 2. Retribusi Pemakaian Kendaraan Berat
	Retribusi Daerah 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Retribusi Penyediaan dan atau Pelayanan Penyedotan Kakus 4. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 5. Retribusi Menara dan Telekomunikasi 6. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 7. Retribusi	

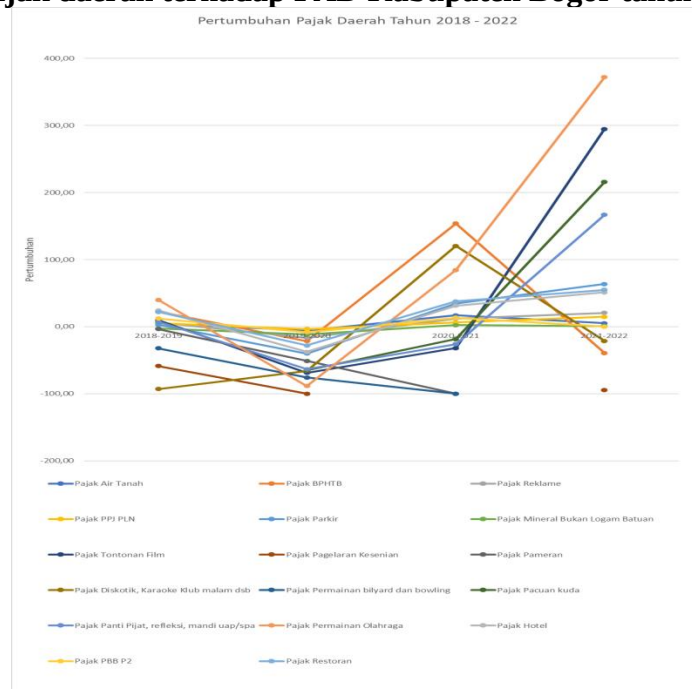
Penyewaan Tanah/Rumija-PPR 8. Retribusi Pemakaian Labolatorium 9. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 10. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	
Kuadran II Potensial	Kuadran IV Terbelakang
Pajak Daerah 1. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan 2. Pajak Pagelaran Kesenian, Musik, Tari dan atau Busana 3. Pajak Pameran 4. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	Pajak Daerh 1. Pajak Permainan Biliard dan Bowling
Retribusi Daerah 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 3. Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Penumpang 4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Retribsusi Daerah 1. Retribusi Izin Treyek

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Komponen pajak daerah maupun retribusi daerah terbanyak terdapat pada kuadran I (prima) terdapat 11 komponen pajak dan 9 komponen retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran I (Prima). Komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran II (Potensial) itu terdapat 4 komponen pajak daerah dan 5 komponen retribusi daerah. Sedangkan kuadran III (berkembang) terdapat 1 komponen pajak daerah dan 2 komponen retribusi daerah. Dan untuk kuadran IV (terbelakang) masing masing dari pajak daerah maupun retribusi daerah terdapat 1 komponen saja yang masuk kedalam kuadran ini.

Pembahasan

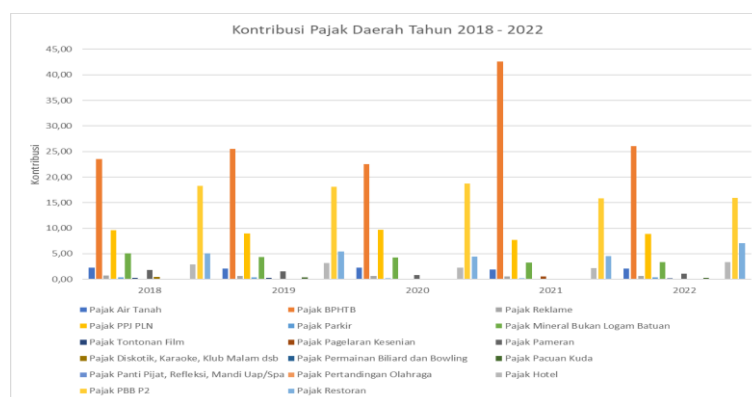
Pertumbuhan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah, 2024

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Dengan pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2021-2022 dengan rata-rata presentase sebesar 65,01%. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang mulai menyetorkan kembali pajaknya dan membuka kembali usahanya setelah pandemi covid 19 mulai menghilang dan kembali normal. Dan pertumbuhan terendah pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata presentase sebesar -1,88%. Hasil ini selaras dengan penelitian dari Juliana (2022) yang menunjukkan pertumbuhan pajak daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2018-2022

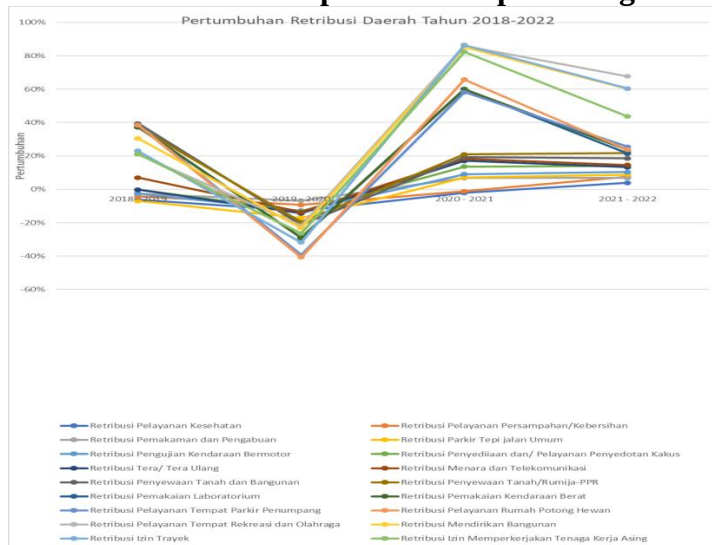


Sumber: Data Diolah, 2024

Dari grafik hasil perhitungan kontribusi pajak daerah diatas, dapat dilihat kontribusi dari tahun 2018-2022 tertinggi itu berada pada komponen pajak daerah BPHTB di tiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 28,03% hal ini disebabkan oleh banyaknya bangunan dan jual beli tanah dan bangunanyang ada di Kabupaten Bogor baik itu untuk

kepentingan pribadi ataupun badan. Dan untuk kontribusi terendah terdapat pada komponen pajak permainan bilyard dan bowling.

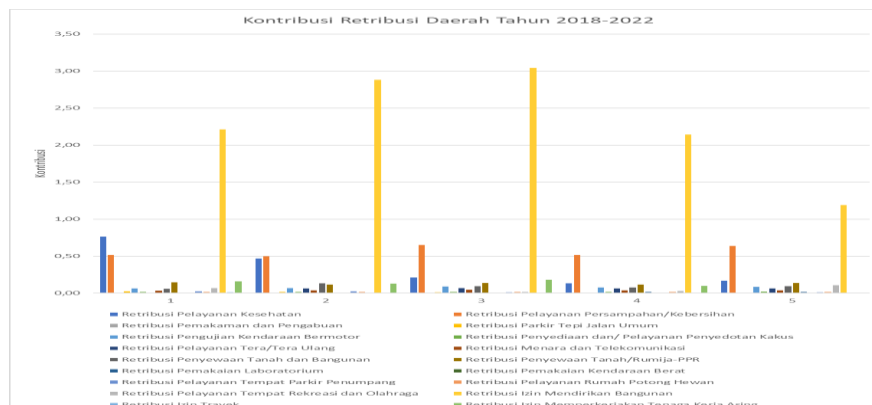
Pertumbuhan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah, 2024

Sama halnya dengan pajak daerah, laju pertumbuhan retribusi daerah pun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh penerimaan retribusi daerah yang juga tidak menentu disetiap tahunnya. Pertumbuhan retribusi tertinggi berada pada tahun 2020-2021 dengan presentase rata-rata pertumbuhan sebesar 32,28%. Dan untuk pertumbuhan terendah berada pada tahun 2018-2019 dengan rata-rata presentase sebesar 5,88%. Hal ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang membuat pertumbuhan retribusi daerah pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang lemah.

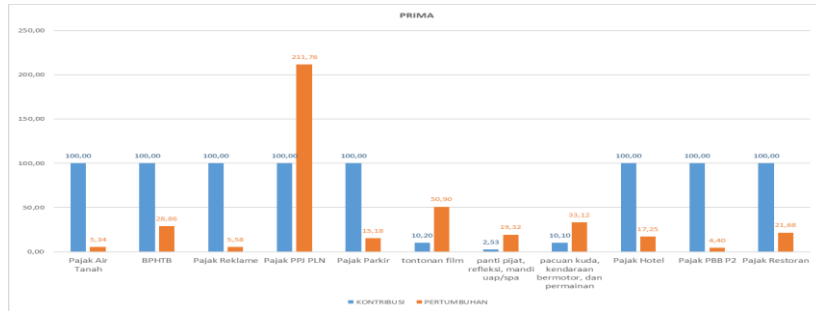
Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor tahun 2018-2022



Sumber: Data Diolah, 2024

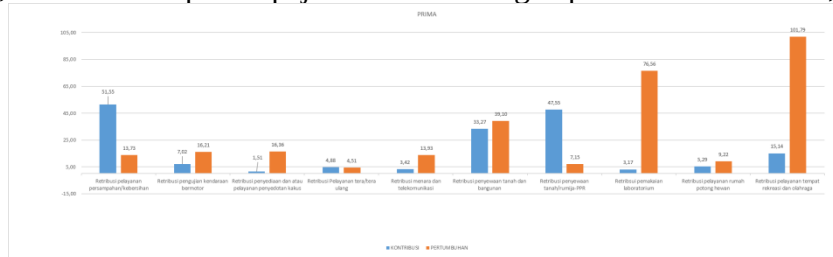
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa komponen retribusi daerah yang paling berkontribusi itu terdapat pada komponen retribusi izin mendirikan bangunan. Dengan presentase rata-rata kontribusi sebesar 2,29% hal ini dibuktikan banyaknya bangunan bangunan yang ada di sekitar Kabupaten Bogor. Kontribusi rendah terdapat pada komponen retribusi Pemakaman dan pengabuan, retribusi pemakaian kendaraan berat, dan retribusi izin trayek.

Analisis Tipologi Klassen Kuadran I (prima)



Sumber: Data Diolah, 2024

Pada gambar diatas terlihat komponen pajak PPJ PLN yang memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 211,76%. Dan rata-rata presentase kontribusi sebesar 100.00% yang diperoleh oleh komponen pajak daerah air tanah, pajak BPHTB, pajak reklame, pajak PPJ PLN, pajak parkir pajak hotel, pajak PBB P2 dan pajak restoran. Sedangkan komponen pajak daerah dengan pertumbuhan terendah ada pada komponen pajak PBB P2 dengan presentase 5,34% dan komponen pajak air tanah dengan presentase sebesar 5,34%.

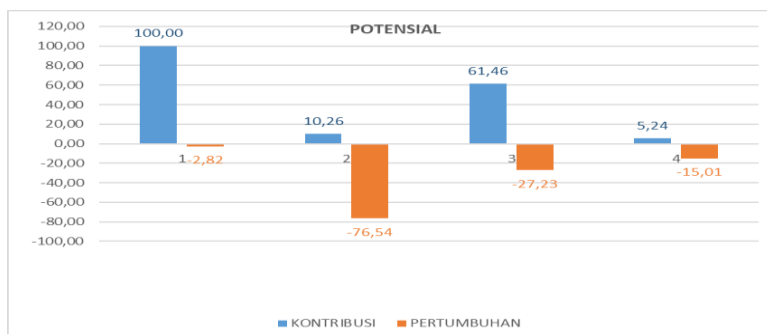


Sumber: Data Diolah, 2024

Pada diagram hasil dapat dilihat pertumbuhan retribusi daerah tertinggi terdapat pada 2 komponen retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yaitu sebesar 101,79% dan retribusi pemakaian laboratorium sebesar 76,56%. Untuk kontribusi tertinggi terdapat pada komponen retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 51,55% dan retribusi penyewaan tanah/rumija DPR yaitu sebesar 47,55%.

Kuadran II (potensi)

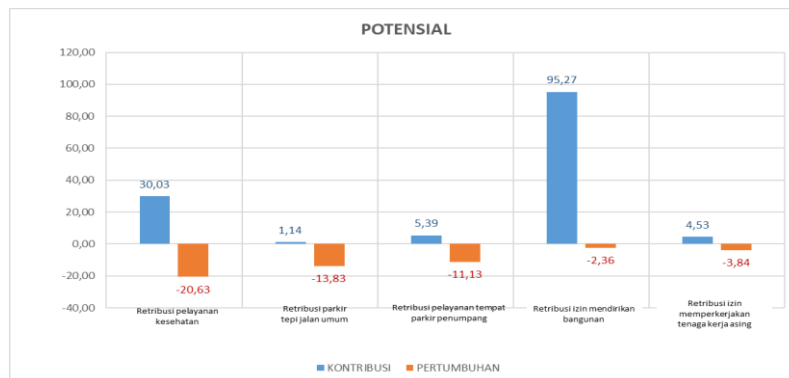
Dari hasil analisis Tipologi Klassen, yang termasuk kedalam kuadran II (Protensial) terdapat 4 komponen pajak daerah sedangkan untuk retribusi daerah terdapat 5 komponen. Berikut diagram pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk kedalam kuadran II (Potensial):



Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil diagram perhitungan kontribusi serta pertumbuhan diatas menunjukkan 4 komponen pajak daerah yang masuk kedalam kategori potensial, hasil diagram menunjukkan bahwa pajak mineral bukan logam memiliki kontribusi yang tinggi dibandingkan dengan pajak pagelaran kesenian musik tari dan busana, dan pajak pameran. Pajak mineral bukan logam yaitu sebesar 100,00% dan pajak pagelaran kesenian musik,

tari dan busana yaitu sebesar 10,26%. Begitu juga pertumbuhan pajak kesian musik, tari dan busana lebih kecil dibandingkan dengan pajak mineral bukan logam yaitu sebesar -76,54% dan pajak kesenian musik, tari dan busana yaitu sebesar -2,82%.



Sumber: Data Diolah, 2024

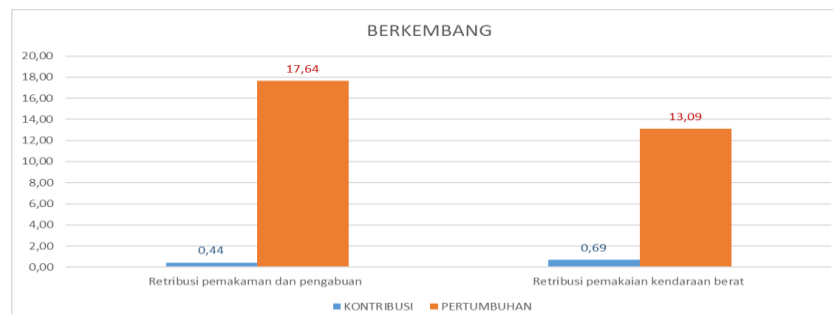
Berbeda dengan pajak daerah, retribusi daerah pada kuadran II (Potensial) kontribusi tertinggi yaitu retribusi izin mendirikan bangunan sebesar 95,27%. Dan tertinggi kedua yaitu dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar 30,03%. Pertumbuhan dari semua komponen retribusi ini memiliki presentase yang minus. Pertumbuhan tertinggi itu ada pada komponen retribusi izin mendirikan bangunan yaitu sebesar -2,36%. Dan untuk pertumbuhan terendah itu berada pada komponen retribusi pelayanan kesehatan yaitu sebesar -20,663%.

Kuadran III (berkembang)



Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil diagram diatas, komponen pajak daerah yang termasuk kedalam kuadran III (Berkembang) hanya 1 komponen pajak daerah saja yaitu pajak pertandingan olahraga dengan presentase kontribusi sebesar 0,38% dan presentase pertumbuhannya yaitu sebesar 11729,43%.



Sumber: Data Diolah, 2024

Retribusi daerah yang masuk kedalam kuadran III ini terdapat 2 komponen. Pertumbuhan tertinggi itu terdapat pada komponen retribusi pemakaman dan pengabuan yaitu pertumbuhannya yang mencapai 23,29%. Dan kontribusi tertinggi ada pada retribusi pemakaian kendaraan berat yaitu sebesar 13,09%. Sedangkan pertumbuhan terendah ada

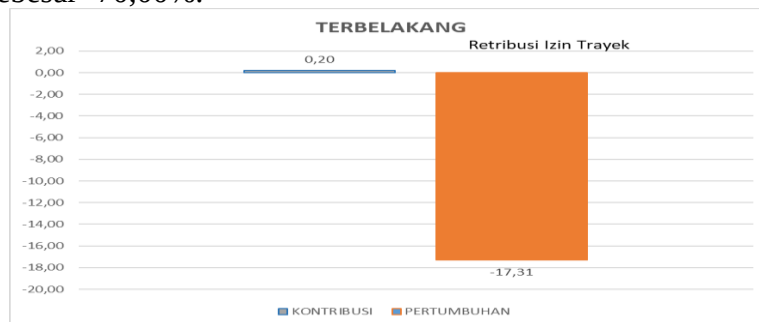
pada komponen retribusi pemakaian kendaraan berat yaitu sebesar 13,09% dan kontribusi terendah ada pada komponen retribusi pemakaman dan pengabuan sebesar 0,44%.

Kuadran IV (terbelakang)



Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil diagram diatas, hanya 1 komponen saja yang masuk kedalam kuadran IV yaitu pajak permainan bilyard dengan presentasi kontribusi sebesar --0,02% dan pertumbuhan sebesar -70,00%.



Sumber: Data Diolah 2024

Retribusi daerah pun terdapat hanya 1 komponen yang masuk kedalam kuadran IV ini, yaitu retribusi izin trayek. Dengan presentase pertumbuhan yaitu sebesar -17,31% dan kontribusinya sebesar 0,20%.

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2018-2022 tahun mengalami penurunan dan juga mengalami kenaikan disetiap tahunnya.
2. Kontribusi pajak daerah tertinggi terhadap PAD adalah pajak BPHTB sedangkan Kontribusi retribusi daerah yang paling berkontribusi terhadap PAD adalah komponen retribusi izin mendirikan bangunan. Kontribusi pajak daerah terendah terdapat terhadap PAD adalah pajak permainan billiard dan bowling dan kontribusi retribusi daerah terendah terhadap PAD ada pada retribusi Pemakaman dan pengabuan, retribusi pemakaian kendaraan berat, dan retribusi izin trayek.
3. Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa Pada kuadran I (Prima) terdapat 11 komponen pajak daerah dari 17 pajak daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah terdapat 10 komponen dari 18 komponen retribusi daerah. Pada Kuadran II (Potensial) terdapat 4 komponen pajak daerah dari 17 pajak yang masuk pada kuadran ini. Dan terdapat 5 dari 18 komponen retribusi daerah. Pada kuadran III (Berkembang) terdapat 1 komponen pajak daerah dari 17 pajak daerah. Dan 2 komponen retribusi dari 18 retribusi daerah. Pada kuadran IV (Terbelakang) terdapat 1 komponen pajak daerah dari 17 total keseluruhan pajak daerah. Dan 1 komponen retribusi daerah dari 18 total keseluruhan retribusi daerah.
4. Upaya-upaya yang dilakukan BAPPENDA untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pasca Pandemi Covid 19 dengan melakukan relaksasi pajak yaitu dengan

mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 dan Keputusan Bupati Nomor 973/1/Kpts/Per-UU/2021

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra. I. M. S., dkk (2021). Metode Penelitian Kesehatan. Medan: Yayasan Kita Menulis
- D. Kartika, IC. Kusuma (2015) Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanjada Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Jurnal Akunida 1(2).
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan kementerian keuangan RI. (2021) Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, Jakarta. Dipetik 10 23, 2023
- Djafar, J. S. (2022). Analisis kontribusi, efektivitas dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (pad) kabupaten tana toraja. EconBank: Journal of Economics and Banking, 4(1), 1-14.
- Dwi Martini, dkk, 2012, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Jakarta: Salemba Empat.
- Firdawati, A., & Astutik, E. P. (2022). Analysis Of Local Taxes and Regional Original Revenue in Kebumen Regency. Current Advanced Research on Sharia Finance an Economic Wordlwide, 2(1), 205-211.
- Hanggara, DR. Agle. (2019) Pengantar Akuntansi Surabaya: CV. Jakad Publishing
- Indra Mahardika Putra. (2017). Perpajakan Edisi: Tax Amnesty. Yogyakarta: Quadrant.
- Keiso D.. Weygandt J.. Warfield T. (21029). Intermediate Accounting. Seventeenth Edition. Wiley. Inc. Usa
- Mardiasmo (2019). Perpajakan. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Riftiasari. D. (2018) Analisia Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- Rusli, R. (2022). Regional Taxes and Levies Contribution to the Increase of Regional Original Income. Journal of Social Commerce, 2(1), 34-41.
- Sudaryo, Yoyo, et. All. 2017. Keuangan di Era Otonomi. Yogyakarta: Andi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Windhu Putra. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. Depok: Rajawali Pers.